

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 21
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Ketua KPU RI 2. Ketua Bawaslu RI 3. Ketua ORI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 25 April 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: 1. Membahas persiapan pelaksanaan Pilkada 2018 2. Membahas laporan hasil pengawasan ORI dan pengaduan masyarakat
Ketua Rapat	: Ir. Fandi Utomo / Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 25 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Selasa, 25 April 2017 dibuka pada pukul 11.05 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. Fandi Utomo dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan pembahasan persiapan pelaksanaan Pilkada 2018, laporan hasil pengawasan ORI dan pengaduan masyarakat .
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua ORI untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

II. KESIMPULAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ombudsman RI :
 1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Ombudsman RI atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016, dan meminta kepada Ombudsman RI untuk terus meningkatkan kinerjanya agar pencapaian pada tahun 2017 dapat lebih optimal.

2. Komisi II DPR RI mendukung Ombudsman RI dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Ombudsman RI dan akan membahasnya secara khusus dalam rapat dengar pendapat yang akan datang.
3. Komisi II DPR RI mendukung Ombudsman RI terkait usulan status kepegawaian asisten Ombudsman RI menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam revisi Undang-Undang ASN.
4. Terhadap usulan Ombudsman RI untuk penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 26.086.423.000,- dan pengalihan anggaran antar program untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana atas penambahan 205 orang calon asisten Ombudsman RI, Komisi II DPR RI akan membahasnya pada RDP yang akan datang saat pembahasan RAPBN-P 2017.

B. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU RI dan Bawaslu RI :

1. Komisi II DPR RI mendorong KPU dan Bawaslu untuk segera mempersiapkan instrumen peraturan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, dengan melakukan penyempurnaan terhadap hal-hal yang perlu perbaikan terhadap evaluasi pelaksanaan pilkada serentak yang lalu.
2. Komisi II DPR RI akan mengagendakan rapat konsultasi dalam forum rapat dengar pendapat terkait pembahasan rancangan Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu
3. Secara khusus Komisi II DPR RI setuju untuk melakukan pembahasan lampiran PKPU terkait jadwal dan tahapan pilkada serentak tahun 2018.
4. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk melakukan evaluasi anggaran pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 agar asas efisien dan efektif dapat terpenuhi
5. Komisi II DPR RI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat bersama KPU, Bawaslu dan pemerintah terkait kesiapan E-KTP dan anggaran Pilkada serentak tahun 2018

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB.

Jakarta, 25 April 2017
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Ir. Fandi Utomo
A-428